



## **AGRESI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK PERIODE 2003-2010**

**Dewi Ayu Wulandari**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **Abstract**

*United States of America aggression raises many questions about the explanations on why US aggression against Iraq. The trigger factors to declare war against Iraq were multifaceted, include: political, economic, ideological, and strategic position. This undergraduate thesis aims to find the factors that cause aggression of US military forces against Iraq as well as the US government policy toward Iraq which was based on a various interests. This research analysis uses the theory of realism in international relations that based on the pursuit of national interest and national security. The research concluded that the US aggression to Iraq period 2003-2010 was based on the interest of US hegemony in the Middle East.*

**Keywords:** *US aggression to Iraq, US policy, the pursuit of national interest and national security*

### **1. Pendahuluan**

Invasi Amerika Serikat terhadap Irak pada 20 Maret 2003 merupakan masalah yang serius. Perang antara AS dan Irak merupakan perang yang timpang dan tidak seimbang terlihat dari aspek kekuatan militernya. Invasi AS mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat Irak seperti kematian dan disintegrasi penduduk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kebijakan Amerika Serikat untuk menginvasi Irak mencerminkan bahwa *pursuit of national interest* dan *national security* merupakan alasan utama yang menjadi dasar Amerika Serikat dalam memutuskan tindakan yang diambilnya terhadap Irak. Berkaitan dengan hal tersebut, Amerika Serikat memposisikan Irak menjadi pangkalan militer strategisnya di Timur Tengah untuk mencapai penguasaan ladang minyak dan hegemoni di Timur Tengah

Pada 19 Maret 2003, koalisi pesawat Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan invasi militer penuh terhadap Irak. Setelah menaklukkan Irak, lebih dari 150.000 pasukan Amerika Serikat menduduki Irak secara paksa (Kim, John H., 2005:1). Tindakan tersebut mengalami perdebatan di dalam rapat umum Dewan Keamanan PBB apakah masuk ke dalam agresi atau tidak berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB untuk menetapkan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal

41 dan Pasal 42 demi memelihara serta memulihkan perdamaian dan keamanan internasional (Kim, John H., 2005:1).

AS siap melancarkan perang melawan Irak meskipun belum ada penjelasan yang meyakinkan tentang mengapa perang dibutuhkan serta ketidaksetujuan masyarakat internasional terhadap serangan AS ke Irak. Perang terhadap Irak akan mengisolasi AS dari seluruh dunia, merusak upaya melawan terorisme, dan membunuh puluhan ribu warga sipil. Amerika Serikat menganggap tindakan invasi ke Irak sebagai *preemptive war* yang didasarkan pada serangan balasan kepada Irak atas dugaan keterlibatan dalam serangan 9/11. Namun, jika dilihat dari bukti-bukti yang ada, Irak tidak terbukti terlibat dalam serangan 9/11. Oleh karena itu, tindakan AS termasuk dalam *preventive war*.

Menurut Pasal enam Piagam Nuremberg, agresi termasuk dalam kejahatan terhadap perdamaian karena termasuk tindakan yang melanggar perjanjian internasional. Kejahatan perang yakni pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang yang mengakibatkan jatuhnya korban dari penduduk sipil. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap penduduk sipil.

Sedangkan Pasal 1 dari Resolusi 3314 PBB tahun 1974 memberikan definisi agresi sebagai suatu tindakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara yang melanggar kedaulatan, integritas teritorial, kemerdekaan politik negara lain, atau semua tindakan yang dilarang oleh Piagam PBB (General Assembly Resolution 3314: Article 1 "*Definition of Aggression*", 14/12/1974).

Ada beberapa alasan mengapa seharusnya Amerika Serikat tidak menginvasi Irak. Pertama, tindakan agresi AS terhadap Irak bukan suatu cara untuk membenarkan perang, mengingat Irak belum melakukan serangan terhadap AS, dan Irak tidak terbukti terlibat dalam serangan 11 September. Kedua, AS menyatakan bahwa serangan kepada Irak dimaksudkan untuk mencegah Saddam Hussein menggunakan senjata pemusnah massal. Tetapi selama tahun 1990-an inspektur senjata PBB telah membongkar semua pabrik-pabrik senjata utama Irak. Ketiga, AS memiliki sedikit sekutu internasional yang mendukung pengiriman inspektur senjata ke Irak untuk melucuti persenjataan yang dimiliki Irak, tetapi tidak mendukung perubahan rezim di Irak. Keempat, serangan AS di Irak akan menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat internasional. Kelima, perang hanya akan menghabiskan dana lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan untuk rakyat AS. Keenam, agresi terhadap Irak akan mencederai perdamaian internasional. Ketujuh, perang akan membunuh ribuan orang. Serangan AS terhadap Irak akan mengakibatkan korban yang jauh lebih besar daripada perang di Afghanistan, karena agresi AS terhadap Irak dapat menyebabkan kematian 80.000 warga sipil tak berdosa. Kedelapan, tujuan utama AS melakukan agresi terhadap Irak adalah untuk menguasai minyak Irak. Terakhir, terdapat pilihan lain selain perang karena agresi yang dilakukan oleh AS melanggar kedaulatan negara Irak sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat serta mengesampingkan opsi negosiasi yang seharusnya lebih menjamin stabilitas keamanan internasional (Enemark C. & Michaelsen C., 2005).

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa penelitian mengenai "Mengapa Amerika Serikat melakukan agresi terhadap Irak? Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat agresi Amerika Serikat terhadap Irak?" merupakan hal yang penting karena dapat diketahui apa saja kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak dan faktor-faktor penyebab tindakan agresi Amerika Serikat terhadap Irak. Selain itu, dapat pula diketahui pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dan dampak agresi Amerika Serikat terhadap Irak.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menganalisis masalah menggunakan teori *pursuit of national interest* dan *national security* dalam pandangan realisme. Realisme memiliki pandangan bahwa sifat dasar manusia jahat dan berkeyakinan hubungan internasional dapat memicu konflik internasional yang pada akhirnya diselesaikan melalui perang, oleh karena itu perlu menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional demi kelangsungan hidup negara karena asumsi dasar yang skeptis terhadap kemajuan politik internasional akibat sistem internasional yang anarki. Realisme menekankan pada kontinuitas dan persaingan militer yang tidak dapat dihindari, dan perang antara negara berdaulat akan tetap terjadi meskipun ada perubahan dalam kepemimpinan atau runtuhnya saingan utama. Hal tersebut merupakan akibat dari pencarian abadi untuk kekuasaan dan keamanan dalam lingkungan politik internasional (Jackson, Robert, & Georg, 2014). Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis di mana penulis akan membuat analisis terhadap gambaran (deskriptif) mengenai data-data, informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan dan hasil rekaman.

## 2. Pembahasan

Pada tanggal 19 Maret 2003, Amerika Serikat melancarkan agresi militer penuh terhadap Irak. Setelah menaklukkan Irak, lebih dari 150.000 pasukan Amerika Serikat menduduki Irak secara paksa. Bagian ini akan mengelaborasi hasil temuan penelitian berupa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan tersebut serta dampak dari agresi militer Amerika Serikat terhadap Irak.

Secara garis besar, terdapat lima faktor utama penyebab agresi AS ke Irak pada tahun 2003. Faktor pertama adalah senjata pemusnah massal atau "*Weapons of Mass Destruction*" (WMD) yang menjadi alasan AS menyerang Irak bahkan sebelum perang dimulai (Schmidt & Williams, 2008). Alasan ini diidentifikasi sebagai alasan utama untuk invasi Irak oleh pemerintahan Bush (Daalder & Lindsay, 2003:156). Tindakan AS tersebut terkait dengan interpretasi penilaian intelijen bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal (Enemark & Michaelsen, 2005:548).

Faktor penyebab kedua sebagai pembenaran untuk menyerang Irak adalah ancaman terorisme yang ditimbulkan oleh Saddam Hussein. Bagi pemerintahan Bush, invasi ke Irak dianggap sebagai perpanjangan dari perang melawan teror. Serangan teroris 11 September menyebabkan pergeseran paradigma sehingga muncul fase baru dalam strategi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS. Segera setelah peristiwa 11 September, mayoritas pembuat kebijakan AS menyerukan invasi ke Irak (Dumbrell, 2005:34). Salah satunya, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld yang menganjurkan menggunakan kekuatan militer terhadap Saddam Hussein (Lieberfeld, 2005:24). Oleh karena itu, pemerintahan Bush menyatakan penggunaan kekuatan militer, pertama, melawan Afghanistan dan kemudian melawan Irak sebagai reaksi terhadap serangan 11 September (Galbraith, 2007:5).

Faktor penyebab ketiga adalah perang Irak dilihat sebagai proses kebebasan, bukan invasi karena rezim Saddam digambarkan sebagai salah satu diktator jahat di dunia. Pemerintah AS dan intervensi militer koalisi sekutu setuju untuk memulai apa yang dikenal di Amerika Serikat sebagai "*Operation Iraqi Freedom*". Pembebasan dan promosi demokrasi memiliki peran penting dalam perubahan rezim Irak (Global Security, 2005).

Alasan invasi keempat adalah terbentuknya aliansi unik dan kemitraan yang terbentuk antara Amerika Serikat dan Israel untuk melawan ancaman strategis yang berkembang di Timur Tengah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak

(Mearsheimer & Walt, 2006:32). Keamanan Israel adalah hal paling penting untuk Amerika Serikat dan telah didukung sejak tahun 1990-an sebagai akibat dari ancaman dari kelompok teroris yang berasal dari dunia Arab dan negara-negara lainnya (Mearsheimer & Walt, 2006:32).

Alasan terakhir adalah faktor ekonomi berupa penguasaan ladang minyak. Hubungan antara minyak dan kekuatan militer kembali muncul di tahun-tahun awal abad kedua puluh (Klare, 2004:148). Dalam hal ini, kepentingan AS di sektor sumber daya minyak dan energi bukanlah subjek baru. Kebijakan Amerika telah didorong oleh dua tujuan yakni dukungan dari Israel dan kontrol tidak langsung dalam pasar minyak seluruh dunia mengamankan pasokan energi masa depan (Hinnebusch, 2007: 212). Mendapatkan kontrol dari minyak Irak diperlukan agar Amerika Serikat bisa mengurangi ketergantungan dari negara-negara Eropa dan Asia Timur pada minyak Teluk Persia (Zunes, 2006:29), dan tidak ada keraguan bahwa hegemoni AS tergantung pada minyak dan sumber daya energi.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa terdapat pula faktor alternatif, yaitu ancaman keamanan terhadap posisi strategis Amerika Serikat di Timur Tengah. Doktrin Bush dimulai dengan asumsi bahwa Amerika Serikat di daam era paska Perang Dingin merupakan satu-satunya negara adidaya di dunia dan salah satu negara yang berusaha untuk mempertahankan posisi hegemoni untuk masa depan yang tak terbatas. Kekuasaan adalah unsur utama dari pemerintahan Bush (Schmidt & Williams, 2008: 195), sehingga invasi adalah tindakan rasional bagi Amerika Serikat dalam mencapai tujuan utamanya untuk menunjukkan kekuatannya kepada sekutu dan pesaing yang sama (Lieberfeld, 2005:4). Hal tersebut merupakan keinginan AS untuk kembali ke kebijakan sebelumnya mengenai peningkatan strategi untuk memenuhi tujuannya hegemoninya, dan langkah pertama dimulai dengan Perang Irak (Mearsheimer & Walt, 2006:58).

Meskipun demikian, setelah dilakukan analisis kembali terhadap faktor-faktor penyebab agresi militer yang menjadi justifikasi invasi Amerika Serikat terhadap Irak ditemukan bahwa:

1. Dugaan Amerika Serikat bahwa Irak mensponsori terorisme tidak terbukti dan tidak ada bukti bahwa Saddam Hussein terlibat dengan peristiwa 9/11 sehingga pemerintah AS berusaha menciptakan sebuah kasus untuk memanipulasi opini publik agar agresi militer terhadap Irak dianggap legal sebagai respon terhadap ancaman yang dirasakan.
2. Inspektur senjata PBB tidak menemukan bukti adanya senjata pemusnah massal di Irak, karena setelah Gulf War I inspektur senjata PBB telah membongkar seluruh fasilitas pengembangan senjata nuklir, kimia, dan biologi di Irak. Kepemilikan senjata pemusnah massal menjadi alasan agar negara lain setuju pada rencana penyerangan Irak.
3. Alasan Amerika Serikat untuk memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat Irak dengan demokratisasi tidak terbukti karena hingga tahun 2011 pasukan militer AS masih melakukan pendudukan wilayah di Irak.
4. Keputusan untuk menggulingkan Saddam Hussein merupakan langkah pertama untuk mengubah posisi strategis AS di Timur Tengah, dengan adanya perang, AS dapat mendirikan pangkalan militernya di Irak untuk mengontrol wilayah Timur Tengah dan memberikan perlindungan penuh kepada Israel.
5. Pemicu terjadinya agresi AS terhadap Irak karena dendam lama dan belum tercapainya kesepakatan pada saat Gulf War I karena Irak telah melanggar Resolusi 687 Dewan Keamanan PBB.

6. Alasan utama agresi AS terhadap Irak adalah kontrol terhadap minyak Irak yang telah didominasi oleh perusahaan-perusahaan AS sebagai pilar utama dari hegemoni AS di Timur Tengah.

Kemudian dengan menganalisis kebijakan Amerika Serikat terhadap Irak, diketahui bahwa *pursuit of national interest* dan *national security* merupakan alasan utama yang menjadi dasar Amerika Serikat dalam memutuskan tindakan yang diambilnya terhadap Irak. Hal tersebut dapat dilihat dari keputusan yang diambil oleh Wakil Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz di dalam “*Defense Planning Guidance 1992*” yang menjadi pedoman strategi militer Amerika. Rancangan tersebut menggambarkan bahwa Amerika harus mempertahankan kekuatan militernya dan menggunakannya untuk melemahkan negara-negara yang memiliki senjata pemusnah massal, termasuk Irak.

Selain itu, dokumen “*National Security Strategy 2002*” juga memperlihatkan bahwa *pursuit of national interest* dan *national security* erat kaitannya dalam setiap pembuatan kebijakan AS. Dalam menghadapi setiap ancaman terhadap keamanan nasional, Amerika melakukan tindakan antisipasi ancaman dengan merencanakan strategi *preemptive* melalui pemanfaatan kekuatan dominan militer AS untuk mencapai tujuan-tujuannya, termasuk hegemoni global. Berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, tindakan *self-defense* untuk *preemptive war* diperbolehkan, akan tetapi jika suatu negara terbukti melakukan serangan terhadap kedaulatan negara lain. Apabila tindakan serangan tidak terbukti, maka *self-defense* tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *preventive war*. Namun tindakan agresi AS terhadap Irak lebih pantas disebut sebagai *preventive war*, karena Irak tidak terbukti terlibat dalam serangan 9/11.

Irak dipandang sebagai lokasi strategis untuk mendirikan pangkalan militer AS di wilayah Timur Tengah. Dimana dapat memberikan keuntungan bagi AS dan sekutu terdekatnya di Timur Tengah, yakni Israel. Selain itu, Irak memiliki cadangan minyak yang besar dan menguntungkan perusahaan minyak AS yang beroperasi di sana. Dengan kekuatan militer dan dukungan perekonomian yang kuat, AS dapat mencapai tujuan hegemoni globalnya di Timur Tengah.

Piagam PBB adalah perjanjian internasional yang paling penting yang membentuk dasar dari perdamaian internasional dan sistem keamanan pada periode paska Perang Dunia II. Piagam mulai diterapkan pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco, dan mulai berlaku untuk AS dan Inggris sebagai perjanjian yang mengikat pada tanggal 24 Oktober 1945. Sebanyak 191 negara, termasuk AS, telah sepakat untuk mematuhi Piagam PBB. Berdasarkan Piagam PBB, penggunaan kekuatan militer hanya di bawah dua kondisi yakni ketika Dewan Keamanan memutuskan untuk menggunakan kekuatan militernya (Pasal 39 dan Pasal 42) dan pertahanan diri (Pasal 51).

Invasi militer Irak, yang secara sepihak dilakukan oleh Pasukan AS-Inggris sebagai “*coalition of willing*” merupakan masalah bagi integritas dan otoritas PBB karena melanggar banyak ketentuan misalnya Pasal 2 (4), 39, 42 dan 51 dari Piagam PBB dan merusak sistem hukum dan keamanan internasional paska Perang Dunia II secara keseluruhan (Kim, John H., 2005: 3).

Dalam pidatonya kepada bangsa pada 17 Maret 2003, Presiden Bush juga secara implisit bergantung pada doktrin pertahanan diri (*self-defense*) sebagai pembenaran lain untuk aksi militer sepihak melawan Irak (Kim, John H., 2005: 5). Adapun pernyataan Bush yang dimaksud adalah:

*"The danger is clear. Using chemical, biological or, one day, nuclear weapons, obtained with the help of Iraq, the terrorists could fulfill their stated ambitions and kill thousands or hundreds of thousands of innocent people in our country or any other....Before the day of horror can come, before it is too late to act, this danger will be removed. The United States of America has the sovereign authority to use force in ensuring its own national security". (New York Times, 2003)*

Pada 20 September 2001, Bush kembali menyampaikan keinginannya ke Kongres didasarkan pada pidatonya pada malam 11 September:

*"We will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime". (Hinnebusch, 2007)*

Pidato Bush tersebut memperlihatkan bahwa alasan rencana serangan AS terhadap Irak adalah sebagai tindakan *preemptive war*. AS akan mengejar negara-negara yang memberikan bantuan atau tempat berlindung bagi teroris. AS menganggap bahwa setiap negara yang menjadi pelabuhan atau mendukung terorisme dianggap sebagai musuh Amerika Serikat.

Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan menyerang Irak adalah tindakan *preemptive*. Akan tetapi, pada kenyataannya, berdasarkan bukti-bukti yang ada memperlihatkan bahwa tindakan penyerangan Irak adalah tindakan preventif. Penulis menganggap bahwa serangan AS terhadap Irak merupakan tindakan preventif karena Irak tidak terbukti terlibat dalam serangan 9/11 dan terorisme. Selain itu, berdasarkan inspeksi inspektur senjata PBB, tidak ditemukan senjata pemusnah masal yang dikembangkan di Irak. Jadi, serangan AS terhadap Irak merupakan tindakan preventif karena tidak ada bukti bahwa Irak ingin menyerang AS, tidak seperti pernyataan Bush yang menegaskan bahwa serangan terhadap Irak merupakan serangan *preemptive*.

Tidak hanya menjadi perang yang tidak memiliki legitimasi, invasi AS juga menambah penderitaan pada masyarakat Irak. Keterlibatan AS dalam konflik Irak dimulai dengan Gulf War 1991 dan dua belas tahun berikutnya Irak berada di bawah sanksi internasional. Perang dan sanksi AS telah menghancurkan infrastruktur negara, baik secara fisik serta sosial di salah satu negara paling berkembang di Timur Tengah itu. Irak memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia Arab, dengan angka partisipasi 100 persen untuk sekolah dasar dan program keaksaraan yang efektif. Namun, selama masa invasi serta pendudukan Irak pada tahun 2003 kondisi Irak berubah, banyak konflik terjadi sehingga mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi masyarakat Irak (Zunes, 2006).

Irak harus menerima kehancuran salah satu kota bersejarah Bagdad dan masjid bersejarah Al-Askari yang merupakan salah satu bukti peradaban manusia. Agresi Amerika ke Irak dan pendudukan AS juga mengakibatkan pembentukan sistem politik sektarian sehingga memicu disintegrasi penduduk dengan terjadinya perbedaan antara kelompok-kelompok etnis dan agama Irak dengan di dominasi Sunni Arab di Irak tengah, Kurdi di utara, sebagian besar Syiah di selatan, dan kelompok-kelompok lain termasuk Turkoman, Assyria Kristen, dan Iran (UNHCR, 2007).

Pada bulan September 2007, *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR) memperkirakan bahwa lebih dari 4 juta warga Irak terusir dari rumah mereka. Perkiraan ini dirilis satu setengah tahun setelah pemboman Masjid Al-Askari di Samara oleh kelompok militan yang telah memicu serentetan kekerasan sektarian

mematikan di Irak. UNHCR menyatakan bahwa lebih dari 2,5 juta warga Irak telah mengungsi dan 2,2 juta pengungsi eksternal menuju negara-negara tetangga Irak dari Yordania, Suriah, Lebanon, Turki, dan Mesir. Meskipun perpindahan ini mulai terjadi sebelum 2003, secara intensif terjadi peningkatan antara tahun 2006-2007 di mana 1,5 juta warga Irak mengungsi dan sekitar 60.000 warga Irak meninggalkan kewarganegaraan mencari suaka di negara-negara industri (UNHCR, 2007). Pada tahun 2010, diperkirakan sebanyak 3,5 juta orang dari total populasi 31,5 juta jiwa tetap tinggal di pengungsian. Para "*internally displaced persons (IDP)*", "*refugees*", "*asylum seekers*", "*returned refugees*", "*stateless persons*", dan "*returned IDPs*" terus memerlukan dukungan UNHCR dan organisasi lokal dan internasional lainnya (UNHCR, 2011).

Masalah-masalah tempat tinggal, keamanan pangan, lapangan kerja, dan pelayanan dasar kesehatan masyarakat seperti air, akses ke perawatan kesehatan, dan sanitasi dianggap isu utama yang menjadi perhatian bagi pengungsi. Isu-isu ini mencerminkan masalah dalam pelayanan publik dan infrastruktur yang dihadapi penduduk negara secara keseluruhan. Menurut *Food Security Assessment*, berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2006 dengan 1.188 rumah tangga IDP di Irak untuk *World Food Program (WFP)*, lebih dari setengah (57 persen) dari rumah tangga pengungsi yang disurvei melaporkan mengalami kekurangan dalam makanan dan melakukan strategi khusus untuk mengatasinya (World Food Program, 2008: 3).

Meskipun begitu, terdapat pula dampak positif dari agresi Amerika Serikat terhadap Irak, salah satunya Irak diperkenalkan dengan sistem pemilihan umum yang sebelumnya tidak pernah diberlakukan di Irak. Selama 24 tahun masa pemerintahan otoriter Saddam Hussein yakni dimulai pada 16 Juli 1979 sampai dengan 30 Desember 2003, Irak tidak pernah diperkenalkan dengan sistem pemilu yang demokratis. Selain itu, angkatan bersenjata Irak diberikan keuntungan dengan adanya pelatihan dari pasukan militer AS. Transfer teknologi militer memberikan kemajuan bagi Irak sehingga banyak kemajuan yang dibuat selama waktu itu, seperti partisipasi penduduk setempat untuk membantu mempertahankan wilayahnya masing-masing. Para penduduk menjaga lingkungan agar aman dan pasukan AS memberikan informasi ketika pemberontakan muncul di daerah, sehingga dapat meminimalisir korban jiwa ([www.nytimes.com/](http://www.nytimes.com/), 2003).

Adanya perusahaan-perusahaan asing yang datang untuk mengolah minyak di Irak membawa dampak positif seperti optimalisasi potensi minyak di Irak. Pemanfaatan teknologi perminyakan yang tepat membawa Irak berada di posisi kelima di dunia sebagai negara pemilik cadangan minyak terbesar dan posisi ketiga di Timur Tengah. Irak memproduksi 2,29 juta barel minyak per tahun 2012. Cadangan minyak Irak terkonsentrasi di kawasan Syiah di selatan serta kawasan Kurdi di utara. Lima lapangan minyak raksasa Irak berada di selatan Irak, yang menyumbang hampir 60% cadangan minyak negara tersebut, sementara di utara menyumbang 17% cadangan minyak. Sebagian besar produksi minyak Irak datang dari pertambangan Kirkuk dan Rumaila. Irak juga memiliki beberapa pertambangan lepas pantai termasuk West Qurna, Az Zubair, Halfaya, Garraf, Badra dan Majnoon, yang diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 14 miliar barel. West Qurna dengan cadangan minyak 12,8 miliar barel merupakan salah satu lapangan minyak terbesar di dunia yang belum seluruhnya dikembangkan. Irak memiliki empat perusahaan minyak negara, yakni *North Oil Company (NOC)*, *Midland Oil Company (MDOC)*, *South Oil Company (SOC)* dan *Missan Oil Company (MOC)*.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agresi militer Amerika Serikat terhadap Irak periode 2003-2010 dilandasi oleh kepentingan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Amerika Serikat berkeinginan menggulingkan rezim Saddam Hussein dan menggantikan pemerintahan Irak dengan pemimpin yang pro demokrasi AS agar dominasi perusahaan-perusahaan pengelola minyak AS di Irak semakin berkembang. Tindakan agresi merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Kepentingan Amerika Serikat terhadap lengsernya Saddam Hussein disebabkan karena adanya beberapa faktor:

1. Kepentingan Nasional
  - a. Komitmen AS untuk “*Global war on terror*”: Serangan 9/11 menyebabkan pergeseran paradigma sehingga muncul fase baru dalam strategi kebijakan luar negeri AS dan keamanan nasional AS. Irak dicurigai terlibat dalam serangan 9/11 sehingga AS harus menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan “*struggle for power*” dengan melakukan tindakan “*preemptive war*” agar dapat meningkatkan hegemoni globalnya di Timur Tengah.
  - b. Kepemilikan minyak Irak: AS memiliki keinginan mengontrol cadangan minyak Irak untuk mengamankan pasokan energi masa depan bagi AS. Minyak merupakan pilar utama dari hegemoni AS yang telah didominasi oleh perusahaan-perusahaan AS dan kontrol mereka di sumber daya minyak dunia yang terkonsentrasi di Timur Tengah. Minyak juga penting sebagai penyokong dana militer AS.
  - c. Pangkalan militer strategis di Timur Tengah: Lokasi Irak dinilai strategis karena dengan memiliki pangkalan militer tetap di Irak, AS dapat menekan Suriah dan Iran. Keuntungan utama dari pangkalan militer di Irak adalah kontrol terhadap negara-negara Timur Tengah dan mengamankan sekutu strategisnya yakni Israel serta mengamankan perusahaan-perusahaan AS yang mengelola minyak di Timur Tengah.
2. Mengembalikan Kepercayaan Global

Sebagai konsekuensi politik global, kejatuhan AS karena serangan 9/11 mengakibatkan penurunan kepercayaan global terhadap kekuatan AS, sehingga Irak dianggap sebagai “*grave and gathering danger*”. Agresi militer AS terhadap Irak bertujuan untuk menunjukkan kekuatan AS kepada dunia bahwa AS merupakan negara yang kuat dalam segala aspek.
3. Hegemoni AS di Timur Tengah

Kegagalan AS dalam menjaga keamanan nasionalnya paska serangan 9/11 menurunkan kepercayaan global bahwa AS pantas disebut sebagai negara adidaya yang telah diakui sejak Perang Dunia I. Reputasi AS menurun sehingga AS berusaha untuk menunjukkan kekuatannya dengan melakukan agresi terhadap Irak. Kontrol penuh terhadap minyak Irak, mengatur pasokan minyak dunia di Timur Tengah, dan keberadaan pangkalan militer di Irak merupakan cara Amerika Serikat memperkuat hegemoninya di Timur Tengah dan memperbaiki reputasinya di dunia internasional.

### Daftar Pustaka

Charter of The United Nations, 1945. *Charter of The United Nations and Statute of the International Court of Justice*. [Online] Available at: <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>. Accessed 9/3/2014.

- Bush, G. H., 2003b. *The White House - President Says Saddam Hussein Must Leave Iraq Within 48 Hours*. [Online] Available at: <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/>. Accessed 19/3/2014.
- Daalder IH, Lindsay JM., 2003. *America Unbound: The Bush Revolution in Foreign Policy*. Washington, D.C: Brookings Institution Press.
- Enemark C, Michaelsen C., 2005. Just War Doctrine and the Invasion of Iraq. *Australian Journal of Politics & History*, pp. 545-563.
- General Assembly Resolution 95 (1), 1946. *Affirmation of the Principles of International Law Recognized by the Charter of Nuremberg Tribunal*. [Online] Available at: [http://legal.un.org/avl/ha/ga\\_95-I/ga\\_95-I.html](http://legal.un.org/avl/ha/ga_95-I/ga_95-I.html). Accessed 10/3/2014.
- General Assembly Resolution 3314, 1974. *Definition of Aggression*. [Online] Available at: <http://legal.un.org/avl/ha/da/da.html>. Accessed 10/3/2014.
- Global Security, 2005. *Operation Iraqi Freedom*. [Online] Available at: [http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraqi\\_freedom.htm](http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraqi_freedom.htm). Accessed 5/12/2014.
- Hinnebusch, R., 2007. The US Invasion of Iraq: Explanations and Implications. *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, XVI(3), pp. 209-228.
- Jackson, Robert, and Georg Sorensen, 2014. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. 5th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Kim, John H., 2005. The Crime of Aggression Against Iraq. p. 1-14.
- Klare, 2004. *Blood and oil: The dangers and consequences of America's growing dependency on imported petroleum*. England: Penguin.
- Lieberfeld, D., 2005. Theories of Conflict and the Iraq War. *International Journal of Peace Studies*, Volume X, pp. 1-21.
- Mearsheimer JJ, W. S., 2006. The Israel Lobby and US Foreign Policy. *Middle East Policy*, pp. 29-87.
- New York Times, 2003. *The New York Times - Iraq War*. [Online] Available at: <http://www.nytimes.com/>. Accessed 6/10/2014.
- Nuremberg Trial Proceedings Vol. 1, 1945. *Charter of the International Military Tribunal*. [Online] Available at: <http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp>. Accessed 9/3/2014.
- PW, Galbraith, 2007. *The end of Iraq: How American Incompetence Created a War Without End*. London: Simon and Schuster.
- Sarkesian, Sam C., John Allen Williams a. Stephen J. C., 2008. *National Interest and National Security - US National Security: Policymakers, Processes, and Politics*. 4th ed. USA: Lynne Rienner Publisher.
- UNHCR., 2011. Global Appeal 2010-2011 in Iraq.
- UNHCR, 2007. Static of Displaced Iraqis around the World: Global Overview.
- UNHCR, 2011. UNHCR Country operations profile - Iraq.
- Viotti, Paul R., & Mark V. Kauppi, 2009. Perspectives and Approaches: How Realist See the World and the State-Centric Approach They Adopt. In: *International Relations and World Politics*. New Jersey: Pearson Education, pp. 88-90.
- WFP, 2008. Rapid Food Security Assessment of IDPs in Iraq. *World Food Programme*, p. 3.
- Zunes, 2006. The United States Belligerent Hegemon. In: *The Iraq war: causes and consequences*. Boulder : Lynne Rienner Publishers, pp. 21-36.